**DIPLOMASI *FRONT de LIBERATION NATIONALE KANAK et SOCIALISTE*
(FLNKS) DALAM MENDAPATKAN DUKUNGAN KEMERDEKAAN
DARI MELANESIAN SPEAREAD GROUP (MSG)**

Author: Dyah Ayu Salsabila

Email: dyahayusalsabila@gmail.com

Supervisor: Ahmad Fuadi S.IP, M.Si

Bibliography: 7 Journals, 13 books, 8 official documents, 24 article/website

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Abstract

This study explains flnks strategy (Kanak and Socialist National Liberation Front) in gaining support to MSG (Melanesian Spearhead Group). It started with the Kanak people calling for a referendum that led to violence and conflict between pro-independence and anti-independence groups.

This study uses pluralism perspective in international relations and group level of analysis supported by diplomacy theory using diplomacy approach that is public diplomacy and this study uses the concept of self-determination. This research is qualitative research with deductive analysis method. The scope of research from this research is FLNKS diplomacy in obtaining support from MSG in 2015-2020.

This research states that FLNKS diplomacy in obtaining independence support from MSG by means of forums conducted by FLNKS and MSG and tangible results reviewed from MSG's support in supporting FLNKS for New Caledonia independence internationally through the UN General Assembly.

Keywords: FLNKS, MSG, Pro-Independence, Self-Determination, Soft Diplomacy

PENDAHULUAN

Kaledonia Baru terletak di sebelah Timur Papua Nugini dan 15000 km dari Perancis. Pada tahun 1853, negara kepulauan ini secara resmi diambil alih oleh Perancis dibawah pemerintahan Napoleon III.¹ Berawal dari seorang penjelajah bernama James Cook ketika melakukan perjalanan keduanya di kawasan pasifik dan menamakan wilayah tersebut dengan nama Kaledonia Baru. Perancis menjadikan Kaledonia Baru sebagai satu dari 12 *Territoire d'Outre Mer*/Wilayah Seberang Lautannya di tahun 1946. Kini Kaledonia Baru merupakan wilayah Perancis dengan hak otonomi khusus *sui generis collectivity* dengan pembagian hak kedaulatan.² Merupakan sebuah teritori seberang laut sejak 1946, adanya hasil dari Piagam Noumea 1998, Kaledonia Baru mendapat status *sui generis* di tahun 1999.

Sebagian penduduk dari Kaledonia Baru terdiri dari orang-orang Eropa yang lahir disana sebanyak 27%, dan penduduk asli Kaledonia Baru yaitu Kanak sebesar 39%. Sebagian besar sisanya berasal dari pulau-pulau Pasifik lainnya, adalah warisan campuran, atau lebih suka diidentifikasi sebagai

"Caledonian".³ Penduduk di Kaledonia Baru bukan hanya penduduk asli dan orang Eropa melainkan orang Vanuatu, Jawa (Indonesia), dan lain-lain.

FLNKS (*Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste*) atau Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis terbentuk karena tidak setujunya orang-orang Kanak yang mendukung Kaledonia Baru merdeka dengan usulan Perancis yang menghendaki otonomi Kaledonia Baru dalam mengelola urusan dalam negeri dan FLNKS ingin Perancis melepas kendalanya atas Kaledonia Baru.⁴ FLNKS masuk ke dalam bagian dari MSG sebagai anggota tetap pada tahun 1989.

Dimulai dari sejarah singkatnya timbulnya gerakan koalisi orang-orang Kanak di Kaledonia Baru yang ingin merdeka dari Perancis yaitu, sektor logam adalah inti utama industri di Kaledonia Baru. Imigran mulai berdatangan ke wilayah Kaledonia pada saat maraknya logam di akhir 1960an dan diawal tahun 1970an.⁵ Berkembang sektor logam di Kaledonia Baru membuat orang-orang Eropa datang karena logam adalah inti utama industri yang ada di Kaledonia Baru.

¹ Husein Abdulsalam. *Referendum Kaledonia Baru: Sebesar Apa Peluang Papua?*, 2019. <https://tirto.id/referendum-kaledonia-baru-sebesar-apa-peluang-papua-dgcl> (diakses pada tanggal 26 September 2019)

² Kementrian Luar Negeri RI. *Kaledonia Baru*, 2014. <https://kemlu.go.id/noumea/lc/read/kaledonia-baru/869/etc-menu> diakses pada 20 November 2019

³BBC. *World Asia Pacific*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16740838> (diakses pada tanggal 26 September 2019).

⁴ Husein Abdulsalam. *Referendum Kaledonia Baru: Sebesar Apa Peluang Papua?*, *Op.cit.*

⁵ David Chappell. "The Kanak Awakening of 1969-1976: Radicalizing Anti-Colonialism in New Caledonia", *Journal de la societe des Oceanistes* 117, hal.188, 2003.

Pada awal tahun 1970an, harga logam di pasar dunia turun dan menghasilkan ‘krisis ekonomi’ di Kaledonia Baru. Pengurangan otonomi politik dan krisis menyebabkan perubahan dalam lanskap politik: Pada bulan Juni 1975, delegasi dan organisasi Kanak bertemu di desa *La Conception* dan menguraikan pernyataan untuk kemerdekaan Kanak. Kemudian, gerakan kemerdekaan mengeraskan sikapnya dan memboikot pemilihan pada November 1987.⁶ Banyaknya imigran berdatangan dan mengambil lahan serta tempat tinggal, membuat orang-orang Kanak mempertanyakan hak-hak mereka.

Hilangnya hak politik, rasa tidak aman yang disebabkan menjadikan Kanak sebagai minoritas di kepulauan dan marginalisasi ekonomi yang memicu permintaan masyarakat Kanak untuk kemerdekaan. Kanak semakin terpinggirkan dan Forum Pasifik mendukung penugasan kembali Kaledonia Baru dalam daftar wilayah non-pemerintahan mandiri PBB.⁷ Orang-orang Kanak pun meminta untuk merdeka dari Perancis.

Belum setahun kesepakatan tersebut ditanda tangani, Jean-Marie Tjibaou, ketua serta wakil ketua FLNKS dibunuh oleh pendukung radikal kemerdekaan yang percaya bahwa Tjibaou mengorbankan orang-orang Kanak oleh partisipasinya Tjibaou dalam proses perdamaian. Batas waktu referendum akhirnya

diperpanjang hingga 2018 ketika negara Perancis, partai loyalis dan pro-kemerdekaan menandatangani Kesepakatan Noumea pada 5 Mei 1998.⁸ Ketua dan wakil ketua dari FLNKS terbunuh oleh pendukung radikal kemerdekaan, membuat perwakilan negara Perancis, partai loyalis dan pro-kemerdekaan untuk menandatangani kesepakatan baru di tahun 1998.

Pada kesepakatan itu menyediakan perjanjian dan diskusi tentang identitas baru, dan nama negara juga bagian dari itu. “*Kanaky*” atau “Kaledonia Baru” mengacu pada identitas negara dan penduduknya.

Pluralisme merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Mereka menyatakan bahwa aktor-aktor tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal. Empat asumsi paradigma pluralis adalah:

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerintah, MNCs, kelompok dan individu.
2. Negara bukan unitary aktor/aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.

⁶ Mickael Forrest & Matthias Kowasch. *New Caledonia and/or Kanaky: On the way to Political Independence?*, Pacific Geographies, 2016. hal.6-7.

⁷ Anna Parrilli. “The New Caledonian Referendum for Independence and Indigenous People”, dalam *Cyprus Center For European And International Affairs*, In Depth, Vol.15 Issue 6, 2018.

⁸ Denise Fisher. *New Caledonia’s Independence Referendum: Local And Regional Implication*, 2019. <https://www.lowyinstitute.org/publications/new-caledonia-s-independence-referendum-local-and-regional-implications> (diakses pada 27 September 2019)

3. Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara.
4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada *power* atau *national security*, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial dan ekonomi.⁹

Teori yang digunakan adalah teori diplomasi publik. Menurut Jay Wang, diplomasi publik sebagai suatu usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antar negara dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah.¹⁰ Langkah diplomasi publik bisa berupa yaitu:

1. Pertemuan dengan pihak-pihak berkepentingan dalam membuat kebijakan seperti PBB.
2. Memanfaatkan atau memaksimalkan media-media ataupun website, yang dapat memberikan wawasan terhadap publik.

Gagasan adanya *self determination right* mula-mula dikemukakan oleh Presiden Wilson dalam pidatonya di depan kongres Amerika Serikat pada 8 Januari 1918, yang kemudian ditegaskan lagi dalam naskah Konvensi Liga Bangsa-Bangsa yang diusulkan, yang antara lain menyebutkan:

⁹ Paul R. Viotti dan Mark V. Kuppi. *International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. (Allyn & Bacon: Needham Heights. 1999), Hal.3.

¹⁰ Jay Wang. "Public Diplomacy and Global Business". *The Journal of Business Strategy*, Vol.27 No.3, 2006, p.49-58.

*The contracting powers unite guaranteeing...territorial reajustment... as many in the future become necessary by reason of change in the present social conditions and aspirations or present social and political relationship, pursuant to the principle of self determination.*¹¹

Maksud dari gagasan tersebut adalah agar diberikan kesempatan pasca perang dunia I berdasarkan asas demokrasi kepada golongan-golongan minoritas di Eropa untuk menentukan nasibnya sendiri dengan membentuk negara-negara merdeka yang tidak dimasukkan dalam wilayah negara-negara yang menang perang.¹²

PBB mengeluarkan Resolusi 1514 (XV), *Declaration on The Granting of The Independence to Colonial Countries and People 1960*. Deklarasi ini memuat prinsip-prinsip penting dan mendasar bagi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri serta kondisi-kondisi yang harus segera dipenuhi oleh penguasa administrasi:¹³

1. Penguasaan/penaklukan bangsa dengan dominasi, eksploitasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia bertentangan dengan piagam PBB
2. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri

¹¹ A. Rigo Sureda, *The Evolution of the Right to Self Determination Right a Study of United Nations Practice*, (A.W. Sithoff: Leiden, 1993), hal.28.

¹² Sidik Suraputra, "Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional Publik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.15 No.299-300, 1985.

¹³ Edward McWhinney, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People, 1960*, <http://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html> (diakses pada 20 Januari 2020)

dan untuk menentukan status politiknya secara bebas dan mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budayanya.

3. Bahwa semua tindakan bersenjata atau tindakan represif dari segala jenis yang ditujukan terhadap orang-orang yang tergantung harus dihentikan.
4. Langkah-langkah segera harus diambil, di wilayah PBB dan non-pemerintahan sendiri atau semua wilayah lain yang belum mencapai kemerdekaan, untuk mentransfer semua kekuasaan kepada orang-orang di wilayah tersebut.

Level analisa yang peneliti gunakan yaitu perilaku kelompok. Para ilmuwan yang menekankan tingkat analisa ini beranggapan bahwa individu umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok, dari tingkat analisa ini FLNKS sebagai kelompok separatis di Kaledonia Baru menjadi fokus pembahasan dari penelitian ini. Perilaku yang ditunjukkan dari FLNKS ini sendiri adalah diplomasi FLNKS dalam mendapatkan dukungan kemerdekaan ke Melanesia Spearhead Group (MSG).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masuknya FLNKS Sebagai Anggota MSG

Pada tahun 1984, FLNKS dibentuk sebagai sebuah payung organisasi untuk kelompok-kelompok pro-kemerdekaan. Di bentuknya FLNKS karena keinginan kuat bangsa Kanak untuk merdeka dari Perancis. Pada pertengahan tahun 1980an, tepatnya pada tahun 1986, Melanesian Spearhead Group (MSG) terbentuk untuk mendukung permintaan

kemerdekaan FLNKS dan juga kebebasan negara dan wilayah Melanesia yang masih di bawah kekuasaan kolonial di Pasifik Selatan, sehingga mengembangkan budaya, politik, sosial dan ekonomi yang lebih kuat. Dengan kehadiran FLNKS ke MSG menjadi salah satu pendorong utama dari penandatanganan *The Agreed Principles of Co-operation Among Independent States of Melanesian* pada tahun 1988 oleh Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu di Port Vila. Pada tahun 1989, FLNKS resmi bergabung ke MSG.

Sebuah unit FLNKS secara resmi dibuka di markas besar Sekretariat MSG di Port Vila, Vanuatu, pada bulan Februari 2013.¹⁴ Unit tersebut akan memberikan nasihat strategis tentang perkembangan politik di Kaledonia Baru, mengawasi implementasi Noumea Accord, memelihara kontak dengan biro politik FLNKS tentang masalah MSG, mengkoordinasikan dan mengelola pertemuan badan MSG tentang hal-hal yang berkaitan dengan FLNKS dan mengelola misi kementerian dan teknis tingkat tinggi yang dilaksanakan di Kaledonia Baru, di antara tugas-tugas lainnya.¹⁵ Pada tahun yang sama, tepatnya bulan Juni 2013, FLNKS pernah secara resmi mengambil alih sebagai ketua MSG pada sebuah upacara yang diadakan di

¹⁴ Pacific Islands Report, *New Caledonia FLNKS Office Opens at MSG Headquarters*, <https://www.pireport.org/articles/2013/02/07/new-caledonia-flnks-office-opens-msg-headquarters> (diakses pada 29 September 2020)

¹⁵ UN General Assembly, *New Caledonia*, A/AC.109/2014/16. (diakses pada tanggal 19 Agustus 2020)

Noumea, Victor Tutugoro menggantikan Voreqe Bainimarama dari Fiji.

Masuknya FLNKS sebagai anggota yang merupakan koalisi partai politik di Kaledonia Baru membuat FLNKS menjadi salah satu kelompok atau organisasi yang menjadi anggota dalam MSG. Dengan masuknya FLNKS kedalam MSG juga mempermudah FLNKS dalam melakukan kerjasama antar anggota MSG serta negara diluar MSG.

B. Pertemuan dan Perumusan *Joint Communique* antara anggota MSG dan FLNKS

Pada 25-26 Juni 2015, KTT MSG ke-20 diadakan di Honiara, Kepulauan Solomon. Pembukaan resmi dan upacara penyambutan KTT dilaksanakan pada 24 Juni 2015 di Museum Nasional Kepulauan Solomon dan dilanjutkan dengan pleno pada 26 Juni 2015 di ruang konferensi Heritage Park Hotel. KTT ini diketuai oleh Manasseh Sogavare, perdana menteri Kepulauan Solomon dan para pemimpin MSG, Victor Tutugoro (juru bicara FLNKS), Josaia Voreqe Bainamarama (PM Republik Fiji), Peter O'Neill (PM Papua Nugini), Johnson Naviti Marakipule (perwakilan PM Vanuatu).

Pada implementasi kesepakatan dan deklarasi Noumea, para pemimpin mengakui dengan rasa terima kasih pembaruan oleh FLNKS tentang implementasi kesepakatan dan deklarasi Noumea. Pemimpin mencatat bahwa FLNKS terus berpartisipasi dalam kelompok kerja yang akan bertemu dari 2015 hingga 2017 untuk mempertimbangkan 4 kekuasaan berdaulat yang belum di transfer oleh Perancis. Komite khusus

atas kesepakatan Noumea diadakan di Perancis pada 05 Juni 2015 yang akan bertanggung jawab mengawasi perkembangan daftar pemilihan yang akan menjadi dasar pelaksanaan referendum 2018. Komite khusus juga setuju untuk memperbaiki dan mengoreksi daftar pemilihan untuk pemilihan provinsi dan untuk referendum.¹⁶

Pada 14 Februari 2018, KTT MSG ke-21 dilaksanakan di Port Moresby, Papua Nugini. Pada KTT tersebut, laporan pertemuan menteri luar negeri (FMM) menyatakan para pemimpin pertimbangan laporan FMM yang disampaikan oleh ketua FMM Rimbink Pato dan mencatat rekomendasi yang terkandung di laporan tersebut. Dalam membahas isu-isu yang terkandung dalam laporan FMM, para pemimpin mendorong direktur jenderal untuk melakukan dialog rutin dengan semua pemimpin agar mereka tetap mengetahui isu-isu MSG terkini dan kinerja Sekretariat. Mengenai situasi di Kaledonia Baru, para pemimpin menegaskan kembali dukungan penuh mereka terhadap proses penentuan nasib sendiri FLNKS dibawah kesepakatan Noumea dan menyetujui rencana aksi/peta jalan referendum di Kaledonia Baru.¹⁷

Pernyataan yang diberikan oleh Ilan Kiloa dalam seminar regional pasifik PBB di Grenada mengenai pelaksanaan dekade internasional ke-3 untuk pendidikan kolonialisme: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah Non-pemerintah sendiri. Ia menyoroti beberapa hal, MSG saat ini berusaha

¹⁶ Melanesian Spearhead Group Summit 20th

¹⁷ Melanesian Spearhead Group Summit 21th

untuk membantu orang Kanak di Kaledonia Baru. Terutama saat KTT MSG ke-21 di Port Moresby, Papua New Guinea, pemimpin MSG telah menyetujui 'rencana aksi tahun 2018 untuk mendukung aspirasi FLNKS untuk penentuan nasib sendiri di Kaledonia Baru'. Singkatnya, rencana aksi tersebut menetapkan dukungan MSG dalam tingkat utama:

1. Tingkat MSG

Dalam tingkat MSG, Sekretariat MSG diarahkan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi studi banding oleh delegasi FLNKS ke negara-negara MSG untuk mempertimbangkan masalah kompetensi berdaulat. Tur ini akan diikuti oleh Misi Menteri MSG ke-4 ke Kaledonia Baru. Mereka juga mengarahkan untuk mengalokasikan sumber daya alam dan keuangan yang sesuai untuk mendukung kegiatan kerja yang berkaitan dengan pekerjaan FLNKS menuju referendum.

Para pemimpin MSG menegaskan kembali komitmen mereka untuk membangun kapasitas Kanak melalui pemberian beasiswa dan kesempatan penugasan di negara-negara anggota. Hal ini penting untuk mengatasi kekurangan dan kebutuhan kapasitas yang lazim di Kaledonia Baru terutama di antara orang Kanak.

2. Tingkat Pasifik

Pada tingkat pasifik, anggota MSG didesak untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap aspirasi FLNKS untuk penentuan nasib sendiri melalui anggota PIF (*Pacific Island Forum*) dan Forum Pembangunan Pasifik dan organisasi terkait lainnya.

3. Tingkat Internasional

Pada tingkat internasional, para pemimpin MSG menyetujui untuk memperkuat keterlibatan dengan perwakilan tetap MSG di PBB untuk mendukung gerakan FLNKS melalui proses PBB dan C24. Anggota MSG didesak untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap aspirasi FLNKS untuk penentuan nasib sendiri di tingkat PBB, khususnya Komite Khusus Dekolonisasi.¹⁸

Pada 18 Juni 2020, Sekretariat MSG dan FLNKS melakukan pertemuan virtual online membahas kemajuan pelaksanaan program kerja 2020. Pertemuan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal George Hoa'au dan difasilitasi oleh Ilan Kiloé selaku manager program bidang politik dan keamanan. Tujuan dari pertemuan tersebut antara lain untuk membahas perkembangan terkini pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun 2020. Secara khusus, memberikan pembaruan tentang persiapan menuju referendum sanksi PBB ke-2 sesuai dengan kesepakatan Noumea tahun 1998.¹⁹

Kiloé mengatakan bahwa urusan FLNKS tetap menjadi bagian integral dari program di Sekretariat MSG. Kiloé memberikan update

¹⁸ MSG, "Implementation of the 3rd International Decade for the Eradication of Colonialism: towards the achievement of the sustainable development goals in the Non-Self-Governing Territories: Social, economic and environmental challenges", *UN Pacific Regional Seminar*, (Grenada: MSG Secretariat, 2018).

¹⁹ MSG, *MSG Secretariat and FLNKS Discuss Progress of 2020 Work Programme Implementation*, <https://www.msgsec.info/msg-secretariat-and-flnks-discuss-progress-of-2020-work-programme-implementation/> (Diakses pada 10 September 2020)

pelaksanaan program kerja FLNKS tahun 2020 khususnya pada rapat Komite Dekolonisasi (C24) pada Februari 2020. Delegasi FLNKS memberikan pembaruan singkat dalam persiapan terhadap referendum tahun 2020, dan peran yang dimainkan MSG dalam mendukung aspirasi rakyat *Kanaky*. Berbicara tentang mendukung, George Hoa'au menegaskan kembali komitmen Sekretariat MSG untuk mendukung FLNKS dalam memajukan aspirasi kemerdekaan mereka melalui proses dekolonisasi saat ini di Kaledonia Baru sebagaimana diatur dalam kesepakatan Noumea tahun 1998. George Hoa'au juga melakukan podcast dalam mendukung FLNKS dan rakyat *Kanaky* untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan serta bersamaan dengan minggu solidaritas untuk wilayah Non-pemerintah sendiri (NSGTs) dalam daftar dekolonisasi PBB.²⁰

C. Pertemuan Sekretariat MSG dengan Duta Besar MSG Berbasis PBB

Manager Program Sekretariat MSG Urusan Politik & Keamanan, Ilan Kiloe, melakukan konsultasi dengan Duta Besar Max Rai, Ketua Duta Besar MSG berbasis PBB dan perwakilan tetap Negara Merdeka Papua Nugini menjelang sesi tahunan Komite Khusus Dekolonisasi (C24) yang diselenggarakan pada 27 Juni 2019 untuk mempertimbangkan persoalan Kaledonia Baru.

Konsultasi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Sekretariat MSG untuk memberikan dukungan teknis dan bantuan yang

²⁰ Ibid.

diperlukan FLNKS saat menjalani proses politik untuk referendum dalam penentuan nasib sendiri di Kaledonia Baru.²¹ Mempertimbangkan hasil referendum 2018 dan pembelajaran yang bermanfaat, pertemuan tersebut menyepakati sejumlah isu penting yang perlu menjadi perhatian komite, selain dari pernyataan MSG pada sidang PBB C24. Masalah-masalah ini termasuk kebutuhan untuk meninjau dan memperbarui 'daftar pemilihan', kebutuhan mendesak untuk meninjau proses dan kriteria pendaftaran orang *Kanaky* untuk memberikan suara dalam referendum dan kebutuhan untuk meningkatkan proses pemungutan suara proxy untuk memastikan transparansi yang lebih besar, gratis dan proses referendum yang adil.²²

D. Dukungan MSG Terkait Upaya FLNKS dalam Kemerdekaan Kaledonia Baru di Dunia Internasional

Dalam kasus yang terjadi di Papua Barat mengenai perjuangan kemerdekaan ULMWP (*The United Liberation Movement For West Papua*), MSG selaku organisasi sub-regional di kawasan pasifik selalu menyuarakan isu-isu yang terjadi kawasan pasifik dari masalah ekonomi, politik, HAM dan keamanan. Ada dua hal yang membuat MSG bisa menyuarakan perjuangan

²¹ MSG, *MSG Secretariat meets with Chair of UN Based MSG Ambassadors in preparation for the Special Committee On Decolonisation (C24) Annual Session*, <https://www.msgsec.info/msg-secretariat-meets-with-chair-of-un-based-msg-ambassadors-in-preparation-for-the-special-committee-on-decolonisation-c24-annual-session/> (diakses pada 29 September 2020)

²² Ibid.

kemerdekaan ULMWP yaitu melalui pers/media masing-masing negara anggota dan forum internasional. Pentingnya bantuan MSG terhadap FLNKS sendiri yaitu mempermudah FLNKS dalam menyuarakan penentuan nasib sendiri orang Kanak di Kaledonia Baru.

Tidak ada perbedaan dalam dukungan yang diberikan oleh MSG terhadap isu yang lain dengan FLNKS, MSG juga menyuarakan dukungan terhadap FLNKS dalam penentuan nasib sendiri di Kaledonia Baru melalui pers/media dari setiap negara anggota MSG, forum pasifik, forum internasional, serta bantuan-bantuan yang diberikan oleh MSG untuk membantu orang-orang Kanak di Kaledonia Baru dalam mengatasi kekurangan dan kebutuhan kapasitas yang lazim.

Walaupun MSG mendukung FLNKS, tapi mereka tidak memiliki *bargaining* dalam isu dekolonisasi di Kaledonia Baru, namun dalam isu Papua Barat bentuk *bargaining* dari MSG sendiri yaitu mengangkat status Indonesia menjadi salah satu *associate member* di MSG dan menjadikan ULMWP (*The United Liberation Movement for West Papua*) sebagai observer akibat desakan dari beberapa anggota MSG yang lebih mendukung ULMWP daripada Indonesia. Namun demikian, Indonesia sendiri telah berjasa membantu MSG dalam mengangkat permasalahan dekolonisasi rakyat Kanak di Kaledonia Baru ke sidang PBB pada masa awal MSG berdiri.²³

²³ Faiz Zuhdi Ramadhan, Skripsi: "Peningkatan Status Indonesia menjadi Associate Member Melanesian Spearhead Group (MSG)" (Jember: Univeristas Jember, 2018), Hal.10-12.

Meninjau dari pernyataan yang diberikan oleh Ilan Kilo mengenai dukungan MSG ke FLNKS dalam tingkat internasional, ia menyebutkan pada tingkat internasional, para pemimpin MSG menyetujui untuk memperkuat keterlibatan dengan perwakilan tetap MSG di PBB untuk mendukung gerakan FLNKS melalui proses PBB dan C24. Anggota MSG didesak untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap aspirasi FLNKS untuk penentuan nasib sendiri di tingkat PBB, khususnya Komite Khusus Dekolonisasi. Proses PBB yang dimaksud yaitu resolusi-resolusi yang dilakukan melalui rapat Majelis Umum PBB, dan Komite Khusus Dekolonisasi (C24) yang membahas tentang situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan deklarasi pemberian kemerdekaan kepada negara dan rakyat kolonial.

Melalui Pernyataan oleh H.E. Robert. G. Aisi selaku wakil tetap dari Papua Nugini ke PBB atas nama Melanesian Spearhead Group (MSG) pada Komite Khusus Politik dan Dekolonisasi, Majelis Umum PBB sesi enam puluh delapan. masih ada 17 wilayah non-pemerintahan sendiri di daftar PBB yang masih membutuhkan status politik masa depan mereka untuk ditentukan dan mencatat kemajuan terbatas yang dibuat menuju penentuan nasib sendiri di beberapa wilayah.²⁴

Menyambut dan mendorong upaya kerja sama konstruktif yang sedang berlangsung pada proses

²⁴ Statement by H.E Mr. Robert. G. Aisi Permanent Representative of Papua New Guinea on behalf Melanesian Spearhead Group at Special Political and Decolonization Committee of UN General Assembly Sixty-Eight Session.

penentuan nasib sendiri Kaledonia Baru di bawah ambisi kesepakatan Noumea pada tahun 1998 bersama dengan resolusi Majelis Umum PBB yang relevan. MSG awalnya dibentuk dengan maksud untuk mendukung upaya penentuan FLNKS di Kaledonia Baru. Para pemimpin telah berkomitmen kembali untuk memperkuat dukungan untuk kapasitas dan pembangunan kelembagaan penduduk asli Kanak di Kaledonia Baru dan untuk bekerja dengan semua pihak yang relevan, termasuk Perancis, sebagai kekuatan administrasi dalam parameter kesepakatan Noumea dan resolusi Majelis Umum PBB yang relevan.²⁵

Menyambut baik informasi terbaru yang disediakan oleh Perancis pada 11 Januari 2013 kepada PBB terkait dengan periode 2012 dan mendorong pembaruan rutin terutama data terpilah di bidang sosial, ekonomi dan bidang politik, sesuai dengan pasal 73E Piagam PBB. Mengulangi seruan untuk pelatihan keterampilan lebih lanjut bagi orang-orang Kanak baik di bidang teknis dan manajemen, pengembangan kapasitas, transfer kompetensi dan juga penekanan yang sama pada pembangunan di semua sektor dan bagian dari wilayah. Mengakui ekonomi Kaledonia Baru yang stabil dan prospek masa depan untuk pertumbuhan yang dipercepat mendorong pelatihan yang ditargetkan ke orang Kanak, terutama pemuda. Penting untuk memastikan keberadaan masyarakat adat sepenuhnya terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan wilayah menuju masa depan. Mendesak agar pembagian dari perkembangan sumber daya alam yang

²⁵ Ibid.

kaya di Kaledonia Baru dibagi secara adil dengan penduduk asli orang Kanak.²⁶

Majelis Umum PBB tahun 2017, resolusi mengenai Kaledonia Baru yang menegaskan kembali hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri seperti yang diabadikan dalam piagam PBB terkait pelaksanaan deklarasi pemberian kemerdekaan ke negara dan rakyat kolonial terkait dengan Kaledonia Baru. Mengingat resolusi 1514 (XV) tanggal 14 Desember 1960 dan 1541 (XV) dari 15 Desember 1960, dan menekankan prinsip VI dari lampiran resolusi 1541(XV) juga ketentuan kesepakatan Noumea, yang antara lain, menggarisbawahi pentingnya transfer kekuasaan dan keterampilan secara tepat waktu dari kekuasaan administrasi untuk rakyat Kaledonia Baru, bahwa sumber daya alam adalah warisan rakyat wilayah non-pemerintah sendiri, termasuk penduduk asli. Segala kegiatan yang bertujuan untuk mengeksploitasi alam dan manusia sumber daya wilayah non-pemerintahan sendiri yang merugikan kepentingan penduduk wilayah itu.

Pentingnya tindakan positif yang dilakukan di Kaledonia Baru oleh otoritas Perancis, dengan bekerja sama dengan semua sektor penduduk, untuk mempromosikan pembangunan politik, ekonomi dan sosial yang adil di wilayah, termasuk tindakan di bidang perlindungan lingkungan dalam menyediakan kerangka kerja untuk kemajuan yang damai menuju penentuan nasib sendiri. Kaledonia Baru telah memasuki fase paling penting pada proses kesepakatan

²⁶ Ibid.

Noumea, suatu periode yang membutuhkan pemantauan ketat berkelanjutan oleh PBB terhadap situasi di wilayah untuk membantu orang-orang Kaledonia Baru dalam menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam piagam dan deklarsi tentang pemberian kemerdekaan ke negara dan rakyat kolonial.²⁷

Hasil rapat kedua belas *Committee of Signatories*, diadakan pada tanggal 3 Oktober 2014, yang antara lain menegaskan komitmen kekuasaan yang mengatur untuk memungkinkan rakyat Kaledonia Baru untuk memutuskan status masa depan dalam penentuan nasib sendiri yang adil, kredibel, demokratis dan transparan proses yang konsisten dengan kesepakatan Noumea. Observasi dan rekomendasi yang terkandung dalam laporan pelapor khusus dewan hak asasi manusia tentang hak-hak masyarakat adat tentang situasi orang Kanak di Kaledonia Baru, untuk membantu upaya berkelanjutan memajukan hak orang Kanak dalam konteks implementasi kesepakatan Noumea dan proses dekolonisasi yang didukung PBB. Pentingnya kesepakatan antara para penandatangan kesepakatan Noumea bahwa kemajuan yang dicapai dalam proses emansipasi harus dibawa untuk perhatian PBB serta untuk terus meninjau proses yang berlangsung di Kaledonia Baru sebagai hasil

penandatanganan kesepakatan Noumea.²⁸

KESIMPULAN

Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste atau biasa disebut Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis adalah salah satu ORMAS (Organisasi Masyarakat) di Kaledonia Baru yang dibentuk pada tahun 1984 di kongres berbagai partai politik. FLNKS sendiri yaitu aliansi partai-partai politik pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru. Komponen-komponen yang terdapat dalam FLNKS yaitu *Caledonian Union* (UC), *Kanak Liberation Party* (PALIKA), *Melanesian Progressive Union* (UPM) dan *Oceania Democratic Rally* (RDO).

Terbentuknya FLNKS karena keinginan kuat bangsa Kanak untuk merdeka dari Perancis. Pada pertengahan tahun 1980an, tepatnya pada tahun 1986, Melanesian Spearhead Group (MSG) terbentuk untuk mendukung permintaan kemerdekaan FLNKS dan juga kebebasan negara dan wilayah Melanesia yang masih di bawah kekuasaan kolonial di Pasifik Selatan, sehingga mengembangkan budaya, politik, sosial dan ekonomi yang lebih kuat. Dengan kehadiran FLNKS ke MSG menjadi salah satu pendorong utama dari penandatanganan *The Agreed Principles of Co-operation Among Independent States of Melanesian* pada tahun 1988 oleh Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu di Port Vila. Pada tahun 1989, FLNKS resmi bergabung ke MSG.

Diplomasi FLNKS dalam mendapatkan dukungan kemerdekaan

²⁷ UN General Assembly, Seventy-Second Session, A/RES/72/104 (diakses pada tanggal 29 Agustus 2020)

²⁸ Ibid.

ke MSG dengan masuk menjadi bagian MSG yang di latar belakang karena keinginan kuat bangsa Kanak untuk merdeka dari Perancis serta FLNKS dan MSG memiliki ras yang sama. Adanya perumusan *Joint Communiqué* antara setiap anggota MSG termasuk FLNKS yang membahas bukan hanya masalah sub-regional, dalam perumusan tersebut juga membahas masalah-masalah pada negara-negara Melanesian serta kegiatan ekonomi dan budaya.

Pada pertemuan KTT yang ke-21 di Port Moresby, Papua Nugini para pemimpin menegaskan kembali dukungan penuh mereka terhadap proses penentuan nasib sendiri FLNKS dibawah kesepakatan Noumea dan menyetujui rencana aksi/peta jalan referendum di Kaledonia Baru. Melalui pertemuan online yang dilakukan oleh FLNKS dan MSG, MSG menegaskan kembali komitmen Sekretariat MSG untuk mendukung FLNKS dalam memajukan aspirasi kemerdekaan mereka melalui proses dekolonisasi saat ini di Kaledonia Baru sebagaimana diatur dalam kesepakatan Noumea tahun 1998.

Melalui pernyataan yang diberikan oleh Ilan Kiloé mengenai rencana aksi dukungan MSG melalui 3 tingkatan yaitu tingkat MSG, tingkat pasifik, dan tingkat internasional. Upaya yang dilakukan MSG dalam tingkat internasional yaitu menyetujui untuk memperkuat keterlibatan dengan perwakilan tetap mereka di PBB untuk mendukung gerakan FLNKS melalui proses PBB dan C24. Anggota MSG juga didesak untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap aspirasi FLNKS untuk penentuan nasib sendiri di tingkat PBB, khususnya Komite Khusus Dekolonisasi melalui Resolusi

Majelis Umum PBB mengenai pelaksanaan deklarasi pemberian kemerdekaan ke negara dan rakyat kolonial yaitu salah satunya Kaledonia Baru.

Serta perwakilan MSG dalam Majelis Umum PBB, dalam pertemuan tersebut para pemimpin MSG telah berkomitmen kembali untuk memperkuat dukungan untuk kapasitas dan pembangunan kelembagaan penduduk asli Kanak di Kaledonia Baru dan untuk bekerja dengan semua pihak yang relevan, termasuk Perancis, sebagai kekuatan administrasi dalam parameter kesepakatan Noumea dan resolusi Majelis Umum PBB. Serta komitmen untuk bekerja dengan semua pemangku kepentingan terkait, terutama orang-orang Kaledonia Baru dan pengelola kekuasaan-Perancis, sesuai dengan kesepakatan Noumea dan di bawah mandat PBB dalam memajukan tujuan yang adil yang akan membawa kebebasan abadi, martabat, kedamaian dan keamanan bagi orang-orang Kanak dan untuk semua orang Kaledonia Baru.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

Chappell, David. "The Kanak Awakening of 1969-1976: Radicalizing Anti-Colonialism in New Caledonia", *Journal de la société des Oceanistes* 117, hal.188, 2003.

Parrilli, Anna. "The New Caledonian Referendum for Independence and Indigenous People", dalam *Cyprus Center For European And International Affairs, In Depth*, Vol.15 Issue 6, 2018.

Suraputra, Sidik. "Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional Publik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.15 No.299-300, 1985.

Wang, Jay. "Public Diplomacy and Global Business". *The Journal of Business Strategy*, Vol.27 No.3, 2006, p.49-58.

BUKU:

Forrest, Mickael & Matthias Kowasch. *New Caledonia and/or Kanaky: On the way to Political Independence?*, Pacific Geographies, 2016. hal.6-7.

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kuppi. *International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. (Allyn & Bacon: Needham Heights. 1999), Hal.3.

Sureda, A. Rigo. *The Evolution of the Right to Self Determination Right a Study of United Nations Practice*, (A.W. Sithoff: Leiden, 1993), hal.28.

LAPORAN RESMI:

UN General Assembly, *New Caledonia*, A/AC.109/2014/16. (diakses pada tanggal 19 Agustus 2020)

Melanesian Spearhead Group Summit 20th

Melanesian Spearhead Group Summit 21th

MSG. "Implementation of the 3rd International Decade for the Eradication of Colonialism: towards the achievement of the sustainable development goals in the Non-Self-

Governing Territories: Social, economic and environmental challenges", *UN Pacific Regional Seminar*, (Grenada: MSG Secretariat, 2018).

Ramadhan, Faiz Zuhdi. "Peningkatan Status Indonesia menjadi Associate Member Melanesian Spearhead Group (MSG)" Skripsi, Univeristas Jember, 2018.

Statement by H.E Mr. Robert. G. Aisi Permanent Representative of Papua New Guinea on behalf Melanesian Spearhead Group at Special Political and Decolonization Committee of UN General Assembly Sixty-Eight Session.

UN General Assembly, Seventy-Second Session, A/RES/72/104 (diakses pada tanggal 29 Agustus 2020)

WEBSITE:

Abdulsalam, Husein. *Referendum Kaledonia Baru: Sebesar Apa Peluang Papua?*, 2019. <https://tirto.id/referendum-kaledonia-baru-sebesar-apa-peluang-papua-dgcl> (diakses pada tanggal 26 September 2019)

BBC. *World Asia Pacific*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16740838> (diakses pada tanggal 26 September 2019).

Fisher, Denise. *New Caledonia's Independence Referendum: Local And Regional Implication*, 2019. <https://www.lowyinstitute.org/publications/new-caledonia-s-independence-referendum-local-and-regional->

implications (diakses pada 27 September 2019)
Kementrian Luar Negeri RI.
Kaledonia Baru, 2014.
<https://kemlu.go.id/noumea/lc/read/kaledonia-baru/869/etc-menu> diakses pada 20 November 2019

McWhinney Edward. *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People*, 1960, <http://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html> (diakses pada 20 Januari 2020)

MSG, *MSG Secretariat and FLNKS Discuss Progress of 2020 Work Programme Implementation*, <https://www.msgsec.info/msg-secretariat-and-flnks-discuss-progress-of-2020-work-programme-implementation/> (Diakses pada 10 September 2020)

MSG, *MSG Secretariat meets with Chair of UN Based MSG Ambassadors in preparation for the Special Committee On Decolonisation (C24) Annual Session*, <https://www.msgsec.info/msg-secretariat-meets-with-chair-of-un-based-msg-ambassadors-in-preparation-for-the-special-committee-on-decolonisation-c24-annual-session/> (diakses pada 29 September 2020)

Pacific Islands Report, *New Caledonia FLNKS Office Opens at MSG Headquarters*, <https://www.pireport.org/articles/2013/02/07/new-caledonia-flnks-office-opens-msg-headquarters> (diakses pada 29 September 2020)